

# PERAN BANK INDONESIA DALAM FINANCIAL STABILITY

Oleh : Idik Sodikin

## **Abstract :**

*The stability of the financial system that is widely used in some countries to combine three things: the allocation of resources so well that the process of intermediation can walk normally, various indicators of financial system still meets the boundary is stable and there has been no public funds are used to penyetamatan financial system. In the context of financial stability, financial institutions need to be clarified which significantly influence the overall financial system, in order to obtain the perception of similarity between all the agencies concerned. Although there is general health level of the bank as a measure of bank health on an individual basis, but basically the size of a bank or financial institution can be said healthy (sound) and stable if the institution can demonstrate its ability to meet its obligations to its customers without the assistance of outside parties (government and relevant authorities). In this context, Bank Indonesia has a role overseeing the development of domestic and international monetary order to continue to condition the value and financial stability.*

**Keywords:** *Financial Stability*

## **Abstraksi:**

Stabilitas sistem keuangan yang banyak dipakai di beberapa negara mengkombinasikan atas tiga hal yaitu: terjadi alokasi resources dengan baik sehingga proses intermediasi bisa berjalan dengan normal, berbagai indikator sistim keuangan masih memenuhi batas stabil dan belum ada dana publik yang dipakai untuk penyetamatan sistim keuangan. Dalam konteks stabilitas keuangan, perlu diperjelas lembaga keuangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan, agar diperoleh kesamaan persepsi antara semua lembaga yang terkait. Meskipun secara umum terdapat tingkat kesehatan bank sebagai ukuran kesehatan bank secara individual, namun pada dasarnya ukuran suatu bank atau lembaga keuangan dapat dikatakan sehat (sound) dan stabil apabila institusi tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada nasabah tanpa adanya bantuan dari pihak luar (pemerintah maupun otoritas terkait). Dalam kontek inilah maka Bank Indonesia memiliki peranan mengawasi perkembangan moneter dalam dan luar negeri guna terus mengkondisikan nilai dan stabilitas keuangan.

**Kata kunci:** Financial Stability

## A. PENDAHULUAN

Stabilitas keuangan telah menjadi sasaran yang penting dalam kebijakan ekonomi keuangan selama beberapa puluh tahun terakhir terutama paska krisis Asia pada tahun 1998. Pada tahun 1980-an, deregulasi terhadap pasar keuangan terutama pemberian kredit atau pemberian fasilitas sejenisnya dari bank serta pengaturan aliran modal antar negara telah dihapuskan secara bertahap di beberapa negara. Kondisi ini telah menyebabkan adanya fondasi yang kuat untuk mengembangkan sektor keuangan sehingga lebih cepat dari pertumbuhan dari sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dalam phase ini, sistem keuangan telah berkembang secara struktural dan menjadi lebih kompleks. Instrument keuangan telah berkembang menjadi beraneka ragam, aktivitasnya lebih terdiversifikasi dan risikonya lebih rumit dengan perubahan yang sangat dinamis. Sektor keuangan juga menjadi lebih terintegrasi dan terkait erat satu sama lain dari segi dimensi industri maupun secara geographis, sehingga sulit diidentifikasi originalitasnya dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan.

Sejalan dengan pertumbuhan yang pesat di sektor keuangan, maka diikuti pula dengan berbagai permasalahan yang semakin sulit terdeteksi secara lebih dini. Krisis di sektor keuangan biasanya berkaitan dengan siklus "*boom*" dan "*bust*" terhadap nitai asset dan kredit. Terjadinya perkembangan pertumbuhan yang cepat harga properti dan kredit konsumsi telah menjadi indikator awal permasalahan instabilitas.

## B. PENTINGNYA FINANCIAL STABILITY

Meskipun secara umum, terutama pelaku pasar keuangan telah familiar dengan isti-

lah Financial Stability, namun kiranya masih perlu diperjelas pengertian dari *Financial Stability*. Belum terdapat suatu definisi yang universal mengenai *Financial Stability*. Andrew Crockett (BIS), mengemukakan bahwa untuk memahami *financial stability*, perlu dibedakan antara stabilitas moneter dengan stabilitas keuangan (*financial stability*).

Bila stabilitas moneter mengacu pada stabilitas harga (*price stability*) dalam bentuk kestabilan nilai mata uang, maka stabilitas keuangan mengacu pada kestabilan institusi keuangan itu sendiri dan stabilitas pasar yang tergabung dalam system keuangan. Pada intinya, "*financial stability is avoidance of crises*" seperti ungkapan I.J. Mcfarlane, Gubernur Reserve Bank of Australia. Oleh karena itu, stabilitas moneter dan stabilitas system keuangan sangat terkait erat, dimana stabilitas moneter hanya dapat dicapai dengan system keuangan yang stabil.

Dalam pendekatan pemahaman yang lebih sempit atas stabilitas sistim keuangan dapat dilakukan dengan mendefinisikan sebaliknya yaitu menghindari adanya "instabilitas sistim keuangan" dimana telah terjadi gangguan terhadap perekonomian. Definisi ini lebih melihat dari sisi kebalikannya dari kondisi yang stabil serta bagaimana mengupayakan untuk menghindari terjadinya instabilitas. Gangguan terhadap perekonomian ditandai dengan timbulnya biaya yang harus dibayar oleh pemerintah.

Beberapa tahun terakhir terlihat bahwa biaya dari krisis ini cukup besar bila dibandingkan dengan GDP suatu negara. Dari pengalaman juga menunjukkan bahwa krisis keuangan dapat terjadi baik dinegara berkembang maupun di negara maju serta dapat menimbulkan dampak ikutan ke negara lain.

Begitu terdapat biaya yang menjadi beban negara untuk penyelamatan sistim

keuangan, maka dapat dikatakan bahwa sudah terjadi instabilitas di sistem keuangan. Penyelematan oleh pemerintah dimaksudkan agar biaya yang ditimbulkan dari krisis dapat diminimalisir.

Definisi stabilitas sistem keuangan yang banyak dipakai di beberapa negara mengkombinasikan atas tiga hal yaitu: terjadi alokasi resources dengan baik sehingga proses intermediasi bisa berjalan dengan normal, berbagai indikator sistem keuangan masih memenuhi batas stabil dan belum ada dana publik yang dipakai untuk penyetamatan sistem keuangan.

Dalam konteks stabilitas keuangan, perlu diperjelas lembaga keuangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan, agar diperoleh kesamaan persepsi antara semua lembaga yang terkait. Dalam prakteknya memang belum terdapat suatu rumusan standar mengenai masalah ini. Pendekatan yang dilakukan di berbagai negara hanya mendasarkan kepada besarnya pangsa pasar, misalnya pangsa kredit dalam industri yang dimiliki oleh suatu lembaga keuangan s/d 80%. Adapun pertanyaannya selanjutnya adalah terkait dengan ukuran stabilitas bagi lembaga keuangan individual.

Meskipun secara umum terdapat tingkat kesehatan bank sebagai ukuran kesehatan bank secara individual, namun pada dasarnya ukuran suatu bank atau lembaga keuangan dapat dikatakan sehat (sound) dan stabil apabila institusi tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada nasabah tanpa adanya bantuan dari pihak luar (pemerintah maupun otoritas terkait). Selama kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dan tidak dapat dipenuhi oleh institusi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa instability telah terjadi.

Komponen yang kedua adalah kestabilan pasar, baik pasar modal maupun pasar uang. Pasar dimaksud dapat dikatakan stabil apabila para pelaku pasar (misalnya investor) masih percaya untuk melakukan transaksi pada tingkat harga yang merupakan refleksi dari fundamental ekonomi dan volatilitas harga pasar yang tidak ekstrem dalam jangka pendek. Kondisi yang tidak stabil tersebut perlu diwaspadai mengingat dalam kondisi terjadinya krisis keuangan maka kondisi tersebut dapat berdampak kepada:

1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat (depositor dan investor) terhadap sistem keuangan, serta dapat menimbulkan bank run,
2. Fungsi intermediasi menjadi tidak efektif, mengingat suku bunga bank menjadi tidak realistis,
3. Alokasi sumber-sumber dana menjadi tidak efektif karena orang akan lebih senang menyimpan uangnya di rumah, atau terjadinya capital outflow,
4. Biaya yang relatif besar untuk menyelamatkan lembaga keuangan atau bank yang memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian
5. Kebijakan moneter tidak dapat diterapkan dengan baik

Dalam hubungan ini, ada sementara pendapat yang mempertanyakan kenapa baru sekarang ini muncul isu mengenai fungsi Financial Stability di Bank Sentral. Masalah tersebut dapat dijelaskan bahwa, selama ini sebenarnya tugas menjaga Financial Stability sudah secara langsung menjadi satu kesatuan dalam tugas Bank Sentral menjaga stabilitas moneter. Mengingat bahwa berbagai permasalahan baru di bidang ekonomi dan keuangan dewasa ini terus bermunculan, maka

fungsi *Financial Stability* menjadi mengemuka dan mendapat perhatian secara khusus.

Di sisi lain penyatuan fungsi *Financial Stability* tersebut dalam fungsi menjaga kestabilan moneter dinilai kurang efektif, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kompleksitas usaha lembaga keuangan/bank telah berkembang begitu pesat, bahkan dalam beberapa kasus terdapat kesulitan untuk menentukan posisi unit usaha bank di dalam suatu struktur konglomerasi yang relatif besar. Apabila terjadi permasalahan pada perusahaan yang ada dalam suatu group (konglomerat), maka tidak tertutup kemungkinan permasalahan tersebut akan dapat membahayakan kelangsungan unit usaha bank yang merupakan bagian integral dalam group usaha tersebut. Disamping itu, kompleksitas instrumen keuangan yang dipakai dan luasnya cakupan daerah operasi, dalam berbagai kasus juga mengakibatkan sulitnya menentukan nationality dari bank tersebut.
2. Dengan semakin majunya sistem informasi dan globalisasi operasi perusahaan keuangan/bank, permasalahan yang terjadi di pasar internasional dapat berdampak langsung terhadap kondisi pasar domestik (*contagion effect*).
3. Capital inflow dan outflow semakin sulit untuk dikendalikan. Kebijakan moneter dan fiscal yang kurang tepat

memungkinkan juga untuk menimbulkan permasalahan di sektor keuangan dan bank.

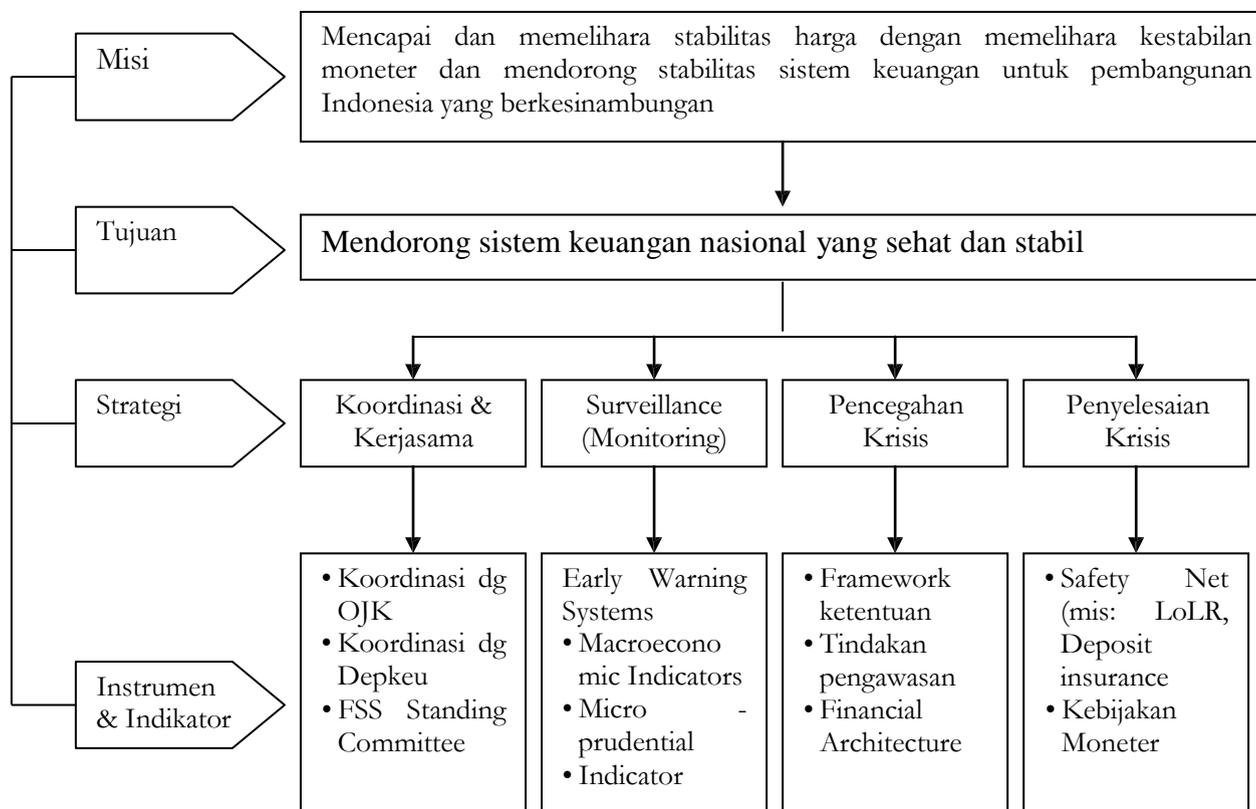
4. Hutang luar negeri yang jatuh tempo di masa mendatang dapat pula menyebabkan adanya tekanan terhadap pasar valas, dimana tingginya permintaan valas tidak sepenuhnya dapat diimbangi dengan penawaran.
5. Struktur ekonomi yang terkonsentrasi pada beberapa kelompok usaha (konglomerat) akan dapat memberikan tekanan dalam *Financial Stability*.

Dengan dilakukannya monitoring secara rutin terhadap komponen-komponen yang dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas keuangan sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan akan dapat dilakukan pencegahan terhadap terjadinya krisis dan pemecahan permasalahannya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak-pihak yang berwenang (*crises resolution*).

### **C. FRAMEWORK DALAM MENJAGA FINANCIAL STABILITY**

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan adanya framework yang telah disepakati oleh lembaga yang terkait (Bank sentral, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah). Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya duplikasi maupun konflik dalam pelaksanaan fungsi di masing-masing lembaga. Secara umum framework tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

## FINANCIAL SYSTEM STABILITY FRAMEWORK



### 1. Misi dan Tujuan

Misi dan tujuan disini diperlukan untuk dipergunakan sebagai acuan dari berbagai pihak, dimana akan lebih baik apabila dapat dituangkan dalam UU. Hal ini bertujuan untuk memberikan pijakan yang lebih jelas bagi institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan monitoring Financial Stability. Di berbagai negara, misi dalam menjaga *Financial Stability* ini dilakukan oleh Bank sentral (mis: Bank of England, Reserve Bank of Australia, Bank of Korea, Bank Negara Malaysia). Pada Bank Indonesia fungsi tersebut telah dimasukkan sebagai misi BI, dimana tugas BI adalah menjaga kestabilan nilai Rupiah, yang tentunya tidak terlepas dari kegiatan menjaga stabilitas moneter dan mendorong stabilitas keuangan di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya selama ini di BI, fungsi menjaga stabilitas keuangan

dimaksud masih menjadi satu dalam fungsi menjaga stabilitas moneter. Mengingat permasalahan dalam Financial System sudah semakin kompleks sebagaimana telah diulas pada bagian sebetulnya, maka fungsi *Financial Stability* akan dipisahkan dari fungsi menjaga stabilitas moneter, sehingga di masa datang akan terdapat dua fungsi yang terpisah satu sama lain dalam struktur organisasi BI yaitu fungsi kestabilan moneter dan kestabilan system keuangan dengan tujuan akhir yang sama yaitu menjaga stabilitas harga. Dalam hubungan ini, tujuan dibentuknya fungsi *Financial Stability* tersebut adalah untuk mendorong terciptanya kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

### 2. Strategy

Dalam menerapkan fungsi *financial Stability* diperlukan suatu strategy yang di-

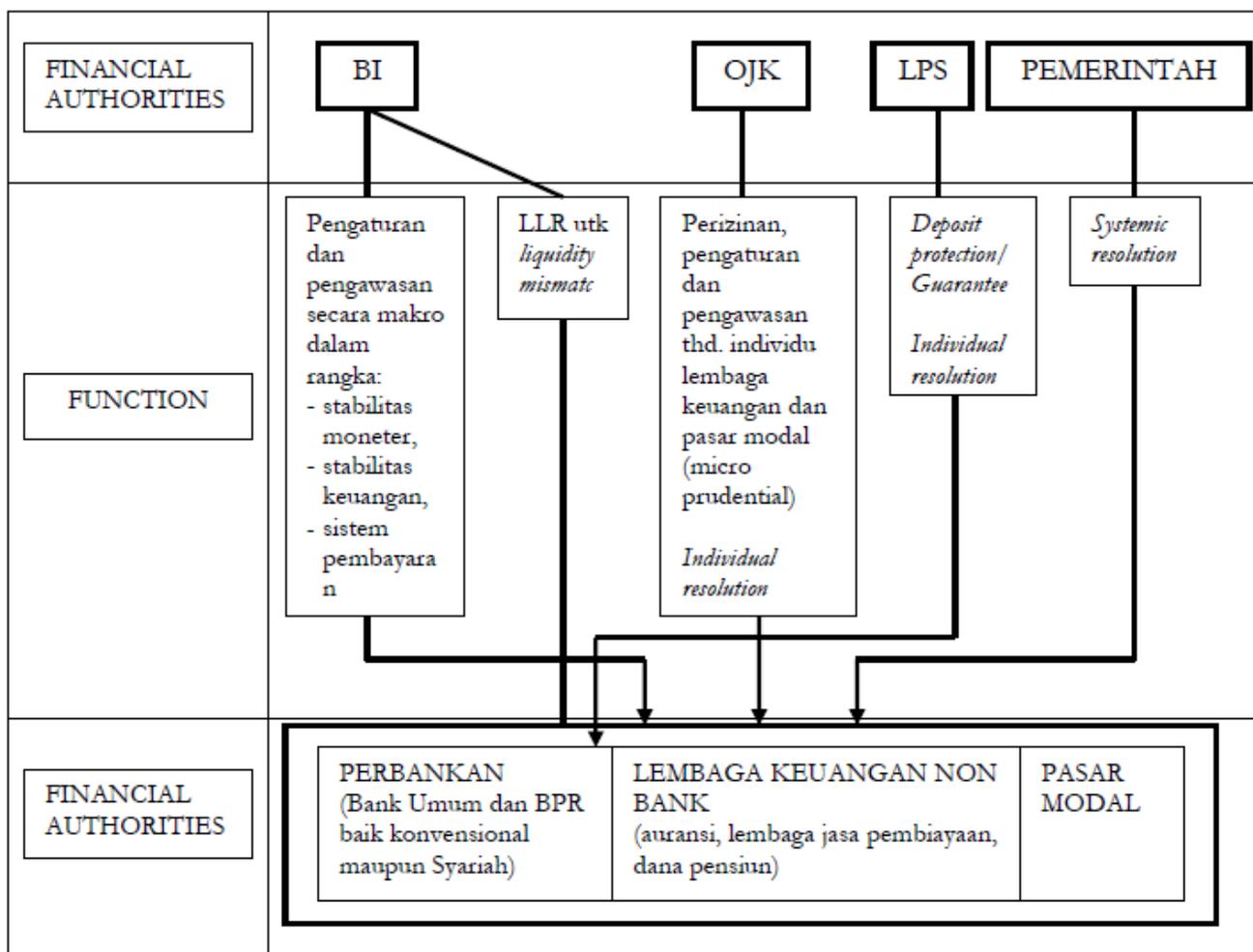
maksudkan untuk menjamin terjadinya efektifitas dalam monitoring stabilitas system keuangan dan dalam mengambil langkah solusi yang perlu dilakukan apabila terjadi krisis keuangan. Strategi ini dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa kelompok yang mengacu pada langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Strategi berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama, *surveillance*, *crisis prevention* dan *crisis resolution* di bawah ini kiranya perlu dimasukkan menjadi komponen UU untuk masing-masing lembaga terkait guna menjamin kelancaran implementasinya. Strategi tersebut dapat diulas sebagai berikut:

### 3. Koordinasi & Kerjasama

Mengingat bahwa unsur-unsur yang ada dalam stabilitas system keuangan ini berada di berbagai otoritas, maka diperlukan koordinasi antara otoritas dimaksud dalam mendefinisikan informasi yang diperlukan dan merumuskan kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh masing-masing otoritas tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kestabilan sistem keuangan.

Dalam hal fungsi pengawasan dan pengaturan bank dipisahkan dari Bank Sentral, maka berdasarkan pengalaman di negara lain, masalah koordinasi ini menjadi kendala. Berbagai issue muncul berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama antara otoritas ini, antara lain sharing informasi mengenai performance individual bank yang berpotensi dapat menimbulkan permasalahan sistemik, dan agregasi berbagai indikator dari industri keuangan seperti NPL, CAR, Liquidity, dll. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk menjamin koordinasi, diantaranya dengan dilakukannya *interlocking management* antara bank sentral dan Otoritas Pengawas Jasa Keuangan. Disamping itu dapat pula dibentuk Financial Stability Standing Committee yang beranggotakan Bank sentral, OJK dan unsur Pemerintah, untuk dapat melakukan koordinasi secara rutin antar lembaga. Dalam hal tidak dimungkinkannya koordinasi dan kerjasama antar lembaga tersebut ke dalam UU, maka hal-hal tersebut dapat dituangkan dalam MOU. Keterkaitan antar lembaga dapat dikemukakan sebagai berikut:

Struktur Yang Terkait Dengan Stabilitas Sistem Keuangan dari Segi Ketembagaan Dan Fungsi (Wacana Sementara ) Lampiran Surat GBI No.4/..../DHK tanggal ... . Februari 2002



#### 4. Surveillance

Dalam menjalankan fungsi maka *Financial Stability* Unit perlu melakukan monitoring terhadap berbagai aspek (indicator) yang berpengaruh terhadap kestabilan sistem keuangan. Indikator dimaksud secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Indikator aggregate mikro prudential
- b. Macro economic indicator

Dengan berbagai indicator dimaksud, maka akan dapat dipakai sebagai input dalam suatu analisis untuk dapat memprediksi sejauh mana tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Berbagai pendekatan *Early warning System* telah diusulkan oleh berbagai forum diantaranya dapat menggunakan

*econometrics tools* maupun stress test terhadap gejala resiko pasar maupun risiko kredit.

#### 5. Crisis Prevention (pencegahan)

Dapat berbagai kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya instability di Financial System. Dalam berbagai forum telah disepakati untuk menerapkan standard atau regulasi yang diterapkan secara internasional yang di motori oleh lembaga internasional seperti IMF, BIS maupun oleh asosiasi praktisi.

Standar dan regulasi dimaksud perlu dijadikan acuan dalam menyusun *Financial System Stability*. Berkaitan compliance terhadap dengan 25 *core principles for effective banking supervision* di Indonesia telah dilakukan peni-

laian secara independen oleh penilai yang direkomendasikan oleh IMF, dimana masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan. Sesuai master plan, Bank Indonesia telah commit untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut melalui suatu detailed action plan yang akan diselesaikan pada akhir 2002.

## 6. Crisis Resolution

Meskipun telah dilakukan berbagai pendekatan untuk menghindari krisis, namun tidak ada jaminan bahwa krisis tidak terjadi. Dalam hal terjadi krisis maka diperlukan suatu prosedur penanganan serta kejelasan peran dan tanggungjawab dari masing masing lembaga. Dalam hal terjadi permasalahan dalam satu bank maka perlu kejelasan beberapa hal :

- a. Wewenang dari lembaga dalam menentukan suatu bank termasuk dalam kategori yang dapat menimbulkan sistemik.
- b. Dalam proses penyelamatan perlu diperjelas dalam UU, mengingat hal ini menyangkut penggunaan *public funds*
- c. Sejauh mana peran bank sentral, otoritas pengawas maupun pemerintah perlu diperjelas.

Peran yang ada pada BI saat ini hanya terbatas kepada pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek untuk bank yang mengalami permasalahan mismatch pendanaan paling lama 90 hari yang dijamin dengan surat berharga yang likuid. Dalam hal terdapat bank yang bermasalah dan tidak memenuhi kriteria, maka BI tidak bisa memberikan pinjaman.

## Daftar Pustaka

- BANK INDONESIA, Dr. Syahril Sabirin, Gubernur BI
- [www. google.co.id](http://www.google.co.id) Dr. Wimboh Santoso

Dalam hal ini perlu diperjelas proses resolusi tentang permasalahan terhadap individu bank yang dapat menimbulkan sistemik. Di berbagai negara antara lain UK dan Australia dibentuk standing committee yang terdiri dari Bank Sentral, Otoritas Pengawas bank dan pemerintah untuk membahas solusi permasalahan yang diusulkan untuk diputus oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah meskipun keputusan final tetap berada di lembaga di maksud.

## D. KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan perlunya monitoring Financial Stability yang dilakukan oleh BI maka diperlukan pembahasan secara lebih detail oleh Tim Pelaksana dalam menyusun berbagai UU yang berkaitan dengan OJK dan amandemen UU Bank Indonesia berkaitan dengan berbagai isu untuk menjamin ketancaran pelaksanaan monitoring Financial Stability terutama berkaitan dengan :

1. Koordinasi dalam mengambil kebijakan, penyusunan peraturan serta sharing informasi
2. Peran masing-masing lembaga dalam *crisis resolution (bail out systemically important* lembaga keuangan)
3. Strategi yang diperlukan di masing-masing lembaga dalam mendorong terciptanya *Financial Stability*

Untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan, maka isu-isu tersebut diatas perlu ditegaskan dalam UU masing-masing lembaga terkait.

